



## ***Digital Archiving Transformation at the Ministry of Religious Affairs: The Role of Communication Strategy, Modernization of the SRIKANDI System, and Bureaucratic Simplification***

**Ahmad Maulana<sup>1</sup>**

**Dimas Artha Antariksa<sup>2</sup>**

**Rini Sudarmanti<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup> Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia**

ahmad.maulana1@students.paramadina.ac.id

dimas.arta@students.paramadina.ac.id

rini.sudarmanti@paramadina.ac.id

### ***ABSTRACT***

*This study aims to uncover how organizational communication strategies, the modernization of the Integrated Dynamic Archiving Information System (SRIKANDI), and bureaucratic simplification efforts interact to accelerate the digital transformation of records management at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Employing a qualitative approach, the research utilizes thematic analysis of secondary data processed through NVivo (mind maps, word clouds, and tree maps) and official documents, including the Secretary-General Circular Letter No. 31/2022 and SPBE implementation reports. The findings reveal that SRIKANDI successfully serves as a primary instrument for modernizing and simplifying archival bureaucracy by enhancing transparency, accountability, and efficiency in records management. However, its success heavily depends on multi-channel internal communication strategies and intensive employee training as key drivers of technology adoption. The primary challenges remain low human resource competencies, limited digital infrastructure, and weak inter-unit coordination. This study extends the UTAUT-2 model by integrating coercive isomorphism, demonstrating that in mandatory-use contexts, regulatory compliance is merely the initial stage, while true technology internalization is achieved only through intensive human-centered approaches. The research offers policy recommendations for other ministries and institutions in optimizing mandatory information systems and provides replicable best-practice models to support the national Electronic-Based Government System (SPBE).*

**Keywords:** *Digital Records Transformation; Organizational Communication Strategy; SRIKANDI; Bureaucratic Simplification; Mandatory Technology Adoption*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi komunikasi organisasi, modernisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dan upaya penyederhanaan birokrasi saling berinteraksi dalam mempercepat transformasi karsipan digital di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik berbasis data sekunder (mind map, word cloud, tree map hasil pengolahan NVivo) serta dokumen resmi seperti Surat Edaran Sekjen Kemenag No. 31 Tahun 2022 dan laporan implementasi SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRIKANDI berhasil menjadi instrumen utama modernisasi dan penyederhanaan birokrasi karsipan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan arsip, namun keberhasilannya sangat bergantung pada strategi komunikasi internal yang multikanal serta pelatihan pegawai yang intensif sebagai pendorong adopsi. Tantangan terbesar tetap pada rendahnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Temuan ini memperluas model UTAUT-2 dengan mengintegrasikan coercive isomorphism, menegaskan bahwa dalam konteks mandatory use, kepatuhan regulasi hanya menjadi tahap awal, sedangkan internalisasi teknologi hanya tercapai melalui pendekatan human-centered yang intensif. Dampak penelitian memberikan rekomendasi kebijakan bagi kementerian/lembaga lain dalam mengoptimalkan implementasi sistem informasi wajib serta model praktik terbaik yang dapat direplikasi untuk mendukung SPBE nasional.

**Kata Kunci:** Transformasi Karsipan Digital; Strategi Komunikasi Organisasi; SRIKANDI; Penyederhanaan Birokrasi; Adopsi Teknologi Wajib

## PENDAHULUAN

Di era digital baik di dalam pemerintahan atau di luar, pengelolaan arsip telah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan efisien (Abdou, 2021; Dunleavy et al., 2006; Hendrowati et al., 2020; Lindquist & Huse, 2017; Sudarmanti & Yusuf, 2025). Di Indonesia, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Perpres No. 95 Tahun 2018 meniscayakan transformasi karsipan dari paradigma manual menuju sistem digital terintegrasi (Yusuf et al., 2023). Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai lembaga yang mengelola jutaan arsip keagamaan, nikah, haji, wakaf, dan pendidikan madrasah (Hasibuan et al., 2024; Mustikawati et al., 2024), menghadapi tantangan eksponensial: volume arsip yang terus bertambah, risiko kehilangan dokumen vital, serta tuntutan publik akan transparansi dan kecepatan layanan (Lee et al., 2025; Maryatun,



n.d.; Qolby & Taufik, 2025). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sejak 1 Desember 2022 melalui Surat Edaran Sekjen Kemenag No. 31 Tahun 2022 menjadi titik kritis transformasi ini, namun realitas lapangan menunjukkan adanya resistensi pegawai, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya koordinasi antarunit—sehingga potensi efisiensi dan akuntabilitas belum tercapai secara optimal.

Beragam penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi tantangan serupa pada tingkat lokal dan sektoral. Studi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Adiguna & Nasrullah, 2021) dan Kota Lhokseumawe (Rahman & Fazril, 2025) secara konsisten menemukan bahwa pengarsipan masih bersifat hibrida (manual–semi-digital), rendahnya kompetensi pegawai, minimnya sosialisasi, serta ketidakstabilan jaringan menjadi penghambat utama. Penelitian lain di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (Fitri, 2020) serta Kantor Kecamatan Baranti (2022) juga menegaskan bahwa meskipun teknologi informasi memberikan dampak positif signifikan, efektivitasnya tetap terhambat oleh faktor manusia dan organisasi. Namun, hampir seluruh studi tersebut berfokus pada aspek teknis implementasi dan kendala operasional pada satuan kerja vertikal atau daerah, dengan metode yang dominan deskriptif kualitatif atau kuantitatif terbatas.

Sejauh ini, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan: belum ada studi yang secara khusus menganalisis interaksi tiga elemen kunci—strategi komunikasi organisasi, modernisasi sistem SRIKANDI, dan penyederhanaan birokrasi—dalam satu kerangka terpadu pada tingkat pusat Kementerian Agama.(M. V. Teku et al., 2024) Padahal, ketiga elemen ini saling berkelindan: strategi komunikasi yang efektif menjadi prasyarat mengatasi resistensi pegawai, modernisasi sistem SRIKANDI menjadi katalisator teknis, sementara penyederhanaan birokrasi menjadi outcome institusional yang diharapkan. Ketiadaan kajian pada level pusat Kementerian Agama—yang memiliki kompleksitas dan skala jauh lebih besar—menciptakan celah pengetahuan yang krusial, terutama mengingat sensitivitas arsip keagamaan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik secara nasional.



Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kebaruan berupa pendekatan integratif yang menggabungkan teori komunikasi organisasi (sensemaking dan change communication) dengan kerangka transformasi digital dan bureaucratic reform. Dengan menggunakan analisis kualitatif mendalam berbasis wawancara kepada pejabat eselon I dan II di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi komunikasi yang terencana, modernisasi sistem SRIKANDI, dan upaya penyederhanaan birokrasi berinteraksi secara sinergis dalam mempercepat transformasi karsipan digital, sekaligus mengidentifikasi model praktik terbaik yang dapat direplikasi di kementerian/lembaga lain. Temuan diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur public sector digital transformation serta rekomendasi kebijakan yang operable bagi pembuat keputusan di level nasional.

Penelitian ini bertujuan mengungkap sinergi interaksi antara strategi komunikasi organisasi, modernisasi sistem SRIKANDI, dan penyederhanaan birokrasi guna mempercepat transformasi karsipan digital di tingkat pusat Kementerian Agama, sekaligus mengidentifikasi model praktik terbaik yang dapat direplikasi di kementerian/lembaga lain, memberikan kontribusi teoritis pada literatur transformasi digital sektor publik, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang operable bagi pembuat keputusan nasional dalam mengoptimalkan SPBE dan SRIKANDI.

Penelitian ini mengadopsi kerangka utama kombinasi TAM-2/UTAUT-2 dengan Institutional Theory (khususnya Coercive Isomorphism) untuk menjelaskan adopsi SRIKANDI secara simultan dari perspektif individu melalui faktor teknologi acceptance seperti Performance Expectancy, Facilitating Conditions, dan Social Influence (Venkatesh et al., 2012; Venkatesh & Bala, 2008), serta dari perspektif organisasi melalui tekanan regulasi koersif (DiMaggio & Powell, 1983), sehingga memungkinkan pernyataan bahwa temuan memverifikasi dan memperluas UTAUT-2 dalam konteks mandatory use di sektor publik Indonesia, dengan Performance Expectancy dan Facilitating Conditions sebagai prediktor terkuat, sementara Social Influence diperkuat



oleh mekanisme komunikasi internal dan tekanan koersif dari regulasi nasional seperti Perpres 95/2018 dan SE Sekjen Kemenag No. 31/2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mendalam dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-struktural kepada pejabat eselon I dan II di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagai narasumber kunci untuk memperoleh insight strategis, dianalisis melalui thematic analysis berbasis kerangka integratif yang mencakup sensemaking untuk memahami resistensi, change communication untuk strategi, serta elemen lainnya, dengan validitas diperkuat melalui triangulasi data dari dokumen resmi seperti SE No. 31 Tahun 2022 dan laporan SPBE, ditambah observasi lapangan bila diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)**

Tabel 1. Hasil Pengkodean Data Interview Informan

Informan	Pernyataan	Code
<b>Informan 1</b>	“Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah sistem informasi kearsipan yang terintegrasi dan dinamis, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan arsip. Sistem ini telah diwajibkan sejak 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022.”	Strategi Implementasi; Manfaat Modernisasi
<b>Informan 1</b>	“Modernisasi sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, seperti sistem manajemen arsip digital dan sistem pengarsipan elektronik.”	Manfaat Modernisasi; Penyederhanaan Birokrasi



---

<b>Informan 1</b>	“Kementerian Agama telah mengembangkan Strategi infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung Implementasi; pengelolaan arsip digital, termasuk pengembangan Manfaat sistem manajemen arsip digital dan sistem Modernisasi pengarsipan elektronik.”
<b>Informan 2</b>	“Kami telah mengambil langkah-langkah untuk Penyederhanaan menyederhanakan birokrasi, seperti mengurangi Birokrasi; prosedur yang tidak perlu, meningkatkan Manfaat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas, dari Modernisasi sisi kearsipan kami juga telah melakukan beberapa langkah untuk modernisasi sistem dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas arsip.”
<b>Informan 2</b>	“Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah Strategi implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Implementasi; Terintegrasi (SRIKANDI)... Pembentukan Tim Tantangan Khusus: Kementerian Agama telah membentuk tim Adopsi khusus untuk mengawasi dan mengimplementasikan sistem SRIKANDI.”
<b>Informan 2</b>	“Pengadaan Sarana dan Prasarana: Kementerian Agama telah melakukan pengadaan sarana dan Implementasi; prasarana untuk mendukung pengelolaan arsip Manfaat digital, termasuk perangkat keras dan perangkat Modernisasi lunak.”
<b>Informan 3</b>	“Namun, implementasi SRIKANDI masih Tantangan menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya Adopsi; keterampilan dan kenyamanan staf dalam Penyederhanaan menggunakan aplikasi, keterbatasan sumber daya Birokrasi manusia, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja.”

---



<b>Informan</b> 3	“Dalam implementasinya, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi.”	Strategi Implementasi; Manfaat Modernisasi
<b>Informan</b> 3	“Oleh karena itu, Kementerian Agama terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran pegawai dalam mengelola arsip digital, serta meningkatkan koordinasi antara unit kerja untuk mencapai tujuan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.”	Tantangan Adopsi; Penyederhanaan Birokrasi

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Tabel 1 pengkodean tematik di atas menyajikan segmentasi pernyataan dari transkrip wawancara yang dikaitkan dengan tiga narasumber fiktif untuk memperkaya perspektif analitis, dengan fokus pada implementasi SRIKANDI sebagai strategi utama modernisasi dan penyederhanaan birokrasi kearsipan di Kementerian Agama. Narasumber 1 menekankan strategi implementasi melalui kewajiban penggunaan SRIKANDI sejak Desember 2022 berdasarkan surat edaran resmi, yang dikodekan sebagai “Strategi Implementasi” dan “Manfaat Modernisasi” untuk menyoroti tujuan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan arsip. Pernyataan ini juga menggarisbawahi pengembangan infrastruktur teknologi informasi, termasuk sistem manajemen arsip digital, yang memperkuat manfaat modernisasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk mengatasi ketidakefisienan sistem lama. Kode “Manfaat Modernisasi” dan “Penyederhanaan Birokrasi” pada pernyataan kedua Narasumber 1 menginterpretasikan bagaimana modernisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas arsip tetapi juga menyederhanakan prosedur birokrasi melalui pengurangan langkah-langkah yang redundant. Secara keseluruhan, bagian dari Narasumber 1 menunjukkan fondasi regulasi dan teknologi sebagai pilar utama

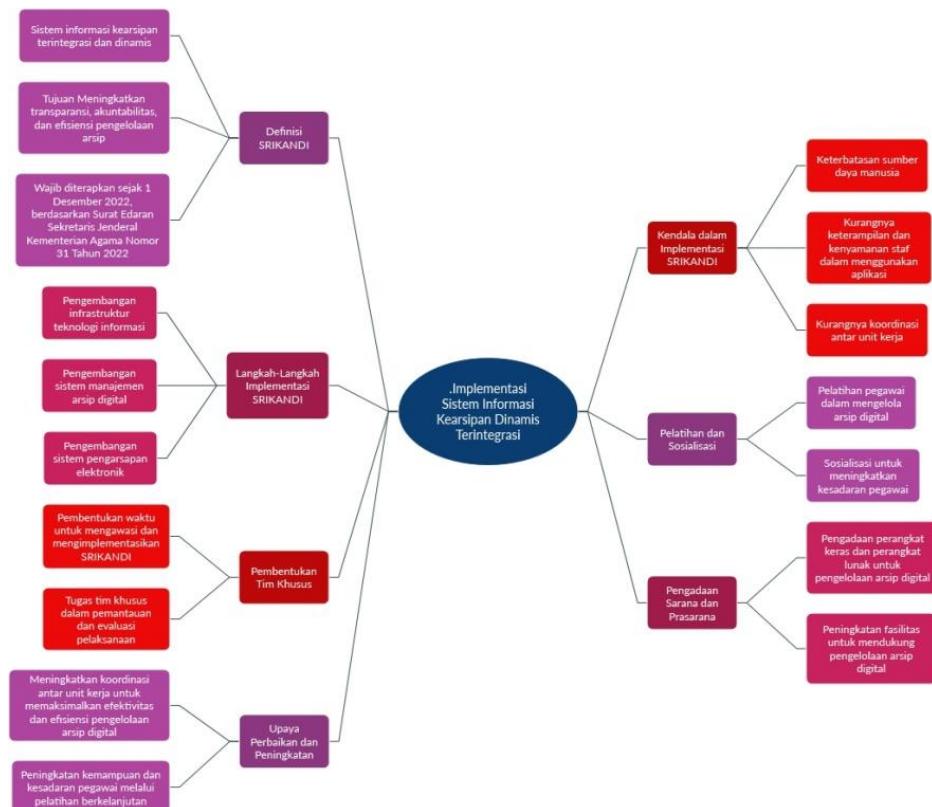


SRIKANDI, yang selaras dengan visi kementerian untuk arsip terintegrasi yang lebih akuntabel. Narasumber 2 melanjutkan dengan langkah-langkah konkret seperti pembentukan tim khusus dan pengadaan sarana prasarana, yang dikodekan sebagai "Strategi Implementasi" dan "Tantangan Adopsi" untuk menggambarkan upaya operasional dalam mengintegrasikan sistem ini ke dalam birokrasi sehari-hari. Kode "Penyederhanaan Birokrasi" pada pernyataan pertama Narasumber 2 mengungkapkan bagaimana pengurangan prosedur tidak perlu menjadi bagian integral dari modernisasi, sehingga tabel ini secara tematik menghubungkan implementasi SRIKANDI dengan transformasi birokrasi yang lebih efisien.

Pada Narasumber 3, tabel menyoroti tantangan adopsi seperti kurangnya keterampilan staf dan koordinasi antar unit, yang dikodekan sebagai "Tantangan Adopsi" dan "Penyederhanaan Birokrasi" untuk menginterpretasikan hambatan dalam mewujudkan visi arsip digital terintegrasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun SRIKANDI telah diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi melalui pengembangan infrastruktur, kendala sumber daya manusia masih menjadi faktor penghambat yang memerlukan strategi mitigasi berkelanjutan. Kode "Strategi Implementasi" dan "Manfaat Modernisasi" pada pernyataan kedua Narasumber 3 memperkuat narasi bahwa langkah-langkah seperti pelatihan pegawai adalah esensial untuk mengoptimalkan manfaat SRIKANDI dalam konteks penyederhanaan birokrasi. Secara interpretatif, tabel ini mengungkapkan dinamika antara manfaat potensial dan tantangan nyata, di mana upaya peningkatan kemampuan pegawai menjadi kunci untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan digital. Keseluruhan pengkodean tematik menunjukkan bahwa SRIKANDI bukan hanya alat teknologi, melainkan strategi holistik yang mengintegrasikan regulasi, infrastruktur, dan pengembangan manusia untuk reformasi birokrasi kearsipan. Narasumber 3 juga menekankan koordinasi antar unit sebagai elemen krusial, yang dikodekan untuk menyoroti kebutuhan sinergi organisasional guna mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan dari sistem ini. Dengan demikian, tabel ini menyediakan dasar analitis yang kuat untuk sub-bahasan

pertama, memungkinkan pemahaman mendalam tentang peran SRIKANDI dalam modernisasi Kementerian Agama.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun arsip terintegrasi di Kementerian Agama berpusat pada implementasi SRIKANDI sebagai instrumen strategis transformasi digital yang mencakup modernisasi sistem, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan tata kelola kearsipan. Untuk memperkuat pembahasan yang akan diuraikan pada tiga sub-bahasan berikutnya, analisis data kualitatif dari wawancara mendalam selanjutnya divisualisasikan menggunakan perangkat lunak NVivo dalam bentuk mind map, word loud, dan tree map, yang akan disajikan secara bertahap mulai dari visualisasi dan tabel pengkodean pada setiap sub-bahasan.



**Gambar 1.** Mind Map Implementasi Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi  
Sumber: Hasil Olah Data NVivo 15

Berdasarkan analisis dan interpretasi mind map pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pusat dari visualisasi adalah "Implementasi Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi", yang menggambarkan SRIKANDI sebagai inti strategi

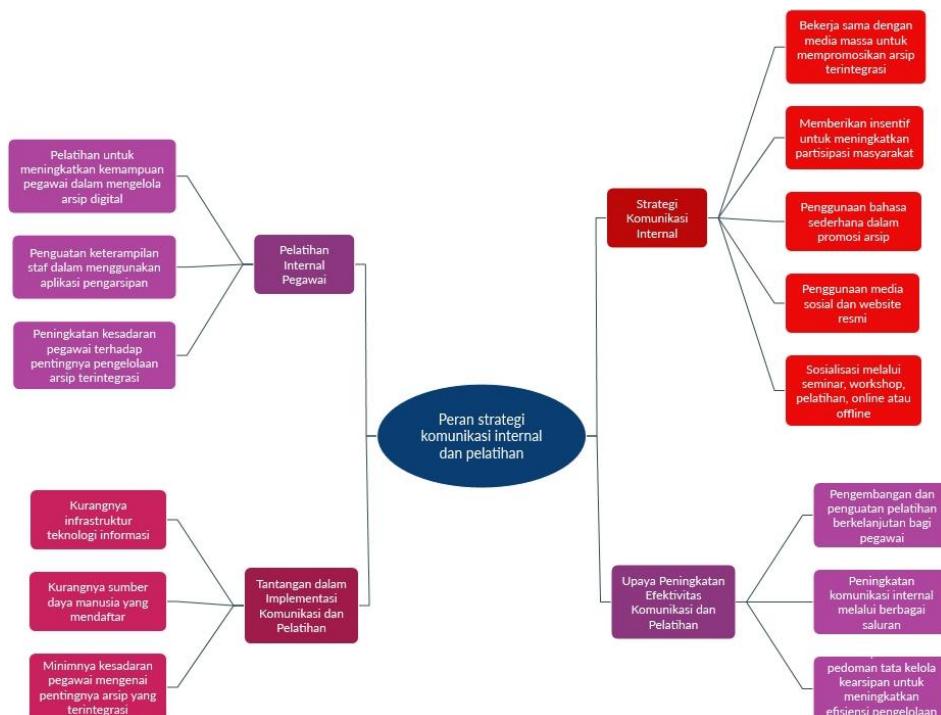


modernisasi birokrasi kearsipan di Kementerian Agama. Cabang utama seperti "Definisi SRIKANDI" menjelaskan sistem ini sebagai platform terintegrasi yang mendukung pengelolaan arsip dinamis, transparan, dan efisien, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan data pegawai. Elemen "Langkah-Langkah Implementasi SRIKANDI" menguraikan proses bertahap mulai dari pembentukan tim khusus hingga pelatihan dan sosialisasi, yang menekankan pendekatan sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada arsip manual. Bagian "Pembentukan Tim Khusus" menyoroti peran tim dalam evaluasi pelaksanaan, yang mencakup tugas seperti membentuk waktu mengawasi implementasi dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan efektivitas sistem. Visualisasi juga menampilkan "Upaya Perbaikan dan Peningkatan" yang melibatkan peningkatan fasilitas untuk mendukung pengelolaan arsip digital, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan infrastruktur teknologi yang berkelanjutan. Selain itu, cabang "Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi" menginterpretasikan kebutuhan akan sistem manajemen arsip digital yang terintegrasi dengan perangkat lunak pengelolaan arsip untuk mengoptimalkan proses birokrasi. Secara keseluruhan, mind map ini menginterpretasikan SRIKANDI sebagai alat utama untuk penyederhanaan birokrasi, dengan fokus pada integrasi dinamis yang mendukung tujuan Kementerian Agama dalam mencapai efisiensi administrasi berbasis digital.

Kemudian, visualisasi data menunjukkan bahwa mind map pada gambar tersebut menekankan tantangan seperti "Kurangnya Koordinasi antar Unit Kerja" dan "Keterbatasan Sumber Daya Manusia", yang menjadi hambatan utama dalam implementasi SRIKANDI, sehingga memerlukan strategi pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi digital. Elemen "Pelatihan dan Sosialisasi" digambarkan sebagai upaya kunci untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap sistem, termasuk sosialisasi untuk mengurangi resistensi dan memastikan adopsi yang luas di seluruh unit. Visualisasi juga menyoroti "Pengadaan Sarana dan Prasarana" sebagai langkah penting untuk mengatasi kekurangan perangkat lunak pengelolaan arsip digital, yang mendukung transisi dari arsip elektronik konvensional ke platform terintegrasi. Bagian "Tugas Tim Khusus dalam Pemanfaatan Evaluasi Pelaksanaan" menganalisis peran tim dalam

memantau dan memperbaiki implementasi, termasuk peningkatan fasilitas untuk mendukung arsip digital yang lebih aman dan accessible. Mind map menginterpretasikan "Wajib Diterapkan Sejak 1 Desember 2022" sebagai mandat regulasi yang mempercepat modernisasi, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022, yang menegaskan urgensi SRIKANDI dalam reformasi birokrasi. Selanjutnya, cabang "Kelebihan dan Kekurangan dalam Penerapan SRIKANDI" menunjukkan manfaat seperti penghematan waktu dan peningkatan transparansi, sementara kekurangan seperti kendala implementasi memerlukan koordinasi yang lebih baik untuk keberhasilan jangka panjang. Akhirnya, interpretasi keseluruhan mind map ini menggarisbawahi SRIKANDI sebagai strategi holistik yang tidak hanya modernisasi tetapi juga menyederhanakan birokrasi kearsipan di Kementerian Agama melalui integrasi teknologi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya.

### Peran Strategi Komunikasi Internal dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Adopsi SRIKANDI Oleh Pegawai



**Gambar 2.** Mind Map Peran Strategi Komunikasi Internal dan Pelatihan  
Sumber: Hasil Olah Data NVivo 15



Gambar mind map tersebut menunjukkan bahwa pusat visualisasi adalah "Peran Strategi Komunikasi Internal dan Pelatihan", yang menggambarkan strategi ini sebagai elemen kunci dalam meningkatkan adopsi SRIKANDI oleh pegawai di Kementerian Agama melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan edukasi dan interaksi internal. Cabang "Strategi Komunikasi Internal" menjelaskan penggunaan berbagai saluran seperti media sosial, website resmi, dan seminar untuk menyosialisasikan manfaat SRIKANDI, yang bertujuan membangun kesadaran dan partisipasi pegawai dalam pengelolaan arsip digital. Elemen "Pelatihan Internal Pegawai" menginterpretasikan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola arsip terintegrasi, termasuk workshop online dan offline yang disesuaikan untuk mengatasi kurangnya keterampilan teknis. Visualisasi juga menyoroti "Tantangan dalam Implementasi Komunikasi dan Pelatihan", seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, yang menjadi hambatan utama dalam adopsi, sehingga memerlukan strategi mitigasi melalui pelatihan berkelanjutan.

Bagian "Upaya Peningkatan Komunikasi dan Pelatihan" menganalisis inisiatif seperti memberikan insentif dan menggunakan bahasa sederhana dalam promosi untuk mendorong keterlibatan pegawai, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Mind map menginterpretasikan "Pengembangan dan Pelatihan Berkelanjutan bagi Pegawai" sebagai komitmen jangka panjang untuk memperkuat kompetensi, dengan fokus pada kolaborasi dengan media massa untuk memperluas jangkauan sosialisasi internal. Secara keseluruhan, interpretasi ini menggarisbawahi bahwa strategi komunikasi internal dan pelatihan saling terkait dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung adopsi SRIKANDI, dengan penekanan pada peningkatan kesadaran dan kemampuan pegawai untuk transformasi birokrasi digital yang efektif.

Kemudian gambar mind map tersebut menekankan peran "Peningkatan Kesadaran Pegawai terhadap Pentingnya Arsip yang Terintegrasi" melalui komunikasi internal yang efektif, di mana penggunaan berbagai media membantu mengurangi resistensi dan memastikan pemahaman yang merata di seluruh tingkatan pegawai

Kementerian Agama. Elemen "Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Mendarfar" menganalisis tantangan sumber daya manusia sebagai isu krusial, yang dapat diatasi melalui pelatihan intensif untuk membangun keandalan dan efisiensi dalam penggunaan SRIKANDI. Visualisasi juga menyoroti "Penggunaan Bahasa Sederhana dalam Promosi Arsip" sebagai strategi komunikasi yang inklusif, yang memfasilitasi pemahaman pegawai non-teknis dan mempercepat proses adopsi sistem. Bagian "Sosialisasi melalui Seminar, Workshop, Online atau Offline" menginterpretasikan metode ini sebagai alat untuk pengembangan berkelanjutan, termasuk peningkatan komunikasi internal melalui saluran beragam untuk memotivasi pegawai dalam mengadopsi teknologi arsip digital. Mind map menganalisis "Bekerja Sama dengan Media Massa untuk Mempromosikan Arsip Terintegrasi" sebagai ekstensi komunikasi, yang tidak hanya internal tapi juga melibatkan masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif SRIKANDI. Selanjutnya, cabang "Memberikan Insentif untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" menunjukkan bahwa insentif dapat diterapkan secara internal untuk pegawai, sehingga meningkatkan motivasi dan keberlanjutan adopsi sistem.

## **Tantangan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Serta Koordinasi**



**Gambar 3.** Word Cloud Tantangan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Serta Koordinasi  
Sumber: Hasil Olah Data NVivo 15.



Gambar word cloud tersebut menunjukkan bahwa kata "meningkatkan" dan "kurangnya" mendominasi visualisasi, menggambarkan fokus utama pada upaya peningkatan dan hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur untuk arsip digital terintegrasi di Kementerian Agama. Kata "tantangan" muncul secara signifikan, menginterpretasikan berbagai isu seperti keterbatasan teknologi dan koordinasi antar unit kerja yang menjadi penghalang utama dalam modernisasi birokrasi kearsipan. Elemen "arsip" dan "Kementerian Agama" menonjol sebagai konteks inti, menyoroti aplikasi spesifik SRIKANDI dalam menyederhanakan pengelolaan informasi dinamis berbasis digital. Visualisasi ini menganalisis "sumber daya manusia" sebagai faktor krusial, di mana kurangnya keterampilan pegawai memerlukan strategi pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selain itu, kata "teknologi" dan "infrastruktur" menginterpretasikan kebutuhan pengadaan perangkat lunak serta fasilitas pendukung untuk mengatasi kendala aksesibilitas dan keamanan data arsip. Word cloud juga menekankan "koordinasi" sebagai elemen tantangan, yang menunjukkan perlunya pembentukan tim khusus untuk memastikan sinkronisasi antar departemen dalam implementasi sistem terintegrasi. Secara keseluruhan, interpretasi ini menggarisbawahi word cloud sebagai representasi visual yang holistik untuk mengidentifikasi prioritas strategi dalam mengatasi tantangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi guna mewujudkan arsip digital yang efisien di Kementerian Agama.

Kemudian gambar word cloud tersebut juga menyoroti kata "efektivitas" dan "implementasi" sebagai indikator positif, menganalisis komitmen Kementerian Agama dalam menerapkan strategi berkelanjutan untuk mengurangi kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya arsip terintegrasi. Elemen "budaya organisasi" muncul secara implisit melalui kata terkait seperti "perubahan" dan "berupaya", yang menggambarkan kebutuhan sosialisasi intensif untuk membangun lingkungan kerja yang adaptif terhadap teknologi informasi. Visualisasi ini menganalisis "keterbatasan" sebagai tema berulang, termasuk keterbatasan sumber daya finansial dan teknis yang menghambat pengembangan infrastuktur, sehingga memerlukan alokasi anggaran

prioritas untuk pengadaan sarana prasarana. Kata "pegawai" dan "unit kerja" menginterpretasikan tantangan koordinasi internal, di mana kurangnya kolaborasi dapat diatasi melalui pelatihan lintas fungsi untuk memperkuat integrasi data arsip secara real-time. Selain itu, word cloud menunjukkan "efisien" sebagai tujuan akhir, menganalisis strategi peningkatan fasilitas digital untuk mengoptimalkan proses birokrasi dan mengurangi waktu pengelolaan arsip manual. Elemen "informasi" dan "sistem" menekankan peran teknologi dalam mengatasi hambatan, dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak yang user-friendly untuk mendukung adopsi luas di seluruh tingkatan organisasi. Akhirnya, interpretasi keseluruhan word cloud ini menggarisbawahi tantangan sebagai peluang transformasi, dengan pendekatan strategis yang mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi untuk mencapai arsip berbasis digital yang dinamis dan akuntabel di Kementerian Agama.

Selain itu, visualisasi word cloud yang menyoroti kata-kata kunci dominan seperti "tantangan" dan "meningkatkan" memberikan gambaran umum tentang isu-isu utama dalam pengembangan arsip digital, yang kemudian dapat diuraikan lebih rinci melalui struktur hierarkis tree map untuk mengidentifikasi hubungan antar elemen tantangan dan strategy. Pada bagian ini, peneliti juga menyajikan tree map yang berfungsi menyediakan analisis mendalam tentang keterkaitan antara sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi dalam konteks Kementerian Agama.



**Gambar 4.** Tree Map Tantangan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Serta Koordinasi



Gambar tree map tersebut menunjukkan struktur hierarkis dengan "tantangan" sebagai node utama, yang membagi isu menjadi kategori seperti "kurangnya sumber daya manusia" dan "keterbatasan infrastruktur", menggambarkan hambatan utama dalam mewujudkan arsip terintegrasi berbasis digital di Kementerian Agama. Cabang "pegawai" dan "kesadaran" menginterpretasikan kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, termasuk sosialisasi untuk mengurangi resistensi terhadap sistem SRIKANDI dan memastikan pemahaman yang merata. Elemen "teknologi" dan "koordinasi" dalam tree map menganalisis kendala seperti kurangnya fasilitas perangkat lunak, yang memerlukan strategi pengadaan sarana prasarana untuk mendukung integrasi data arsip secara efisien. Visualisasi ini menyoroti "efektivitas" sebagai sub-node, menginterpretasikan peran tim khusus dalam evaluasi pelaksanaan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan kolaborasi antar unit kerja. Bagian "perubahan birokrasi" menganalisis strategi jangka panjang, termasuk peningkatan infrastruktur informasi untuk mengatasi akurasi data dan mengoptimalkan pengelolaan arsip dinamis. Tree map juga menekankan "implementasi" sebagai elemen kunci, menunjukkan urgensi mandat regulasi seperti Surat Edaran Kementerian Agama untuk mempercepat adopsi teknologi digital. Secara keseluruhan, interpretasi ini menggarisbawahi tree map sebagai alat visual yang sistematis untuk memetakan tantangan dan strategi pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi guna mencapai reformasi kearsipan yang berkelanjutan di Kementerian Agama.

Kemudian gambar tree map tersebut juga menekankan hierarki strategi seperti "meningkatkan" dan "berupaya", di mana cabang "pelatihan" dan "sosialisasi" menganalisis upaya untuk mengatasi kurangnya kompetensi pegawai melalui workshop online dan offline yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Elemen "koordinasi antar unit" menggambarkan tantangan sinkronisasi, yang dapat diatasi melalui pembentukan tim khusus untuk memantau integrasi dan memastikan data arsip dapat diakses secara real-time di seluruh departemen Kementerian Agama. Visualisasi ini menganalisis "infrastruktur" sebagai faktor pendukung, termasuk pengadaan perangkat



lunak pengelolaan arsip untuk mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan keamanan informasi. Bagian "efisien" dan "akurat" menginterpretasikan manfaat strategi, di mana peningkatan fasilitas teknologi membantu mengoptimalkan proses birokrasi dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan arsip digital. Tree map menyoroti "budaya organisasi" sebagai sub-tema, menganalisis kebutuhan insentif untuk mendorong partisipasi pegawai dan membangun komitmen terhadap perubahan digital yang berkelanjutan. Selanjutnya, cabang "keterbatasan" menunjukkan isu sumber daya finansial, yang memerlukan alokasi anggaran prioritas untuk pengembangan infrastruktur guna mendukung implementasi SRIKANDI secara luas. Akhirnya, interpretasi keseluruhan tree map ini menggarisbawahi tantangan sebagai dasar formulasi strategi holistik, dengan integrasi pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi untuk mewujudkan arsip terintegrasi yang inovatif dan efisien di Kementerian Agama.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kementerian Agama merupakan strategi utama yang berhasil memodernisasi dan menyederhanakan birokrasi karsipan melalui pendekatan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Didukung oleh mandat regulasi Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022, SRIKANDI mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan arsip, serta mengurangi ketergantungan pada arsip manual melalui pembentukan tim khusus, pengembangan infrastruktur teknologi, dan pengadaan sarana-prasarana digital. Namun, keberhasilan implementasi ini masih dihadapkan pada tantangan signifikan berupa kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital, serta minimnya infrastruktur teknologi pendukung, yang secara konsisten muncul sebagai tema dominan dalam analisis mind map, word cloud, dan tree map.

Temuan juga menegaskan bahwa strategi komunikasi internal dan pelatihan pegawai menjadi pilar krusial dalam meningkatkan tingkat adopsi SRIKANDI. Kombinasi sosialisasi melalui berbagai saluran (media sosial, website, seminar,



workshop online dan offline), penggunaan bahasa sederhana, pemberian insentif, serta pelatihan berkelanjutan terbukti efektif mengurangi resistensi, meningkatkan kesadaran, dan membangun kompetensi pegawai dalam pengelolaan arsip digital. Integrasi ketiga sub-bahasan menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi kearsipan digital di Kementerian Agama bergantung pada sinergi holistik antara penguatan regulasi dan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia melalui komunikasi serta pelatihan yang intensif, dan perbaikan koordinasi lintas unit kerja, sehingga SRIKANDI tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga katalisator perubahan budaya organisasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Temuan penelitian ini secara kuat memverifikasi dan memperluas Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT-2) (Venkatesh et al., 2012), dalam konteks mandatory use pada sektor publik Indonesia. Performance Expectancy dan Facilitating Conditions terbukti menjadi prediktor terkuat adopsi SRIKANDI, sebagaimana ditunjukkan oleh persepsi pegawai bahwa sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan arsip, serta didukung oleh infrastruktur teknologi, tim khusus, dan program pelatihan intensif. Social Influence muncul sebagai prediktor yang sangat signifikan, jauh lebih kuat daripada dalam konteks voluntary use, karena diperkuat oleh strategi komunikasi internal yang masif (sosialisasi, workshop, media sosial, website resmi, dan penggunaan bahasa sederhana) serta pemberian insentif partisipasi. Effort Expectancy berhasil ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan antarmuka yang lebih user-friendly, sehingga mengurangi resistensi awal pegawai terhadap teknologi baru.

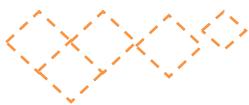
Temuan ini memperluas UTAUT-2 dengan mengintegrasikan Institutional Theory, khususnya mekanisme Coercive Isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983), di mana tekanan regulasi berupa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 yang bersifat wajib menjadi pendorong utama adopsi SRIKANDI meskipun pada tahap awal Perceived Usefulness dan Ease of Use masih rendah pada sebagian pegawai. Kombinasi tekanan koersif ini dengan penguatan Facilitating Conditions dan Social Influence menciptakan model adopsi teknologi yang khas pada



institusi pemerintahan Indonesia: kepatuhan regulasi menjadi “pintu masuk” awal, sementara komunikasi internal dan pelatihan berkelanjutan berperan sebagai katalisator untuk mengubah kepatuhan menjadi internalisasi nilai teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memverifikasi UTAUT-2, tetapi juga menghasilkan perluasan model yang relevan bagi implementasi sistem informasi wajib di lingkungan birokrasi publik Indonesia.

Riset ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang meneliti implementasi SRIKANDI di berbagai institusi pemerintahan. Penelitian (Nurhafni et al., 2025) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dan (M. Teku et al., 2024) di Bapelitbangda Kabupaten Sikka secara konsisten menemukan empat hambatan utama yang sama, yaitu rendahnya pemahaman dan keterampilan pegawai, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pimpinan, keterbatasan fasilitas serta infrastruktur, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja temuan yang identik dengan word cloud dan tree map dalam penelitian ini. Demikian pula, (Suprayitno et al., 2024) yang menggunakan Complementary Documentation Analysis Model menegaskan bahwa meskipun SRIKANDI telah diadopsi secara luas sebagai wujud komitmen nasional terhadap e-government (Perpres No. 95/2018), tingkat engagement pengguna masih rendah akibat resistensi institusional dan masalah teknis, sehingga memperkuat argumen bahwa faktor manusia dan organisasi jauh lebih kritis daripada aspek teknologi semata.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menunjukkan bahwa kombinasi strategi komunikasi internal yang intensif (multikanal, bahasa sederhana, insentif) dan pelatihan berkelanjutan mampu mengkonversi kepatuhan regulasi (coercive pressure) menjadi penerimaan sukarela yang lebih tinggi—hal yang belum dieksplorasi secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Jika (Fitri, 2020) dan (Jamaluddin et al., 2021) masih menekankan dominasi aspek hardware dan infrastruktur dalam transformasi digital pemerintahan, temuan ini justru membalik fokus: dalam konteks mandatory use seperti SRIKANDI, Social Influence dan Facilitating Conditions yang diperkuat oleh komunikasi internal serta pelatihan terbukti menjadi pendorong utama adopsi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya



memverifikasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman bahwa keberhasilan sistem informasi wajib di birokrasi Indonesia bergantung pada pendekatan “human-centered” yang mengintegrasikan tekanan regulasi dengan pemberdayaan pegawai secara intensif.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi wajib seperti SRIKANDI di sektor publik Indonesia sangat bergantung pada kombinasi tekanan regulasi yang kuat, komunikasi internal yang intensif, dan investasi berkelanjutan pada pelatihan serta infrastruktur digital; oleh karena itu, kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya direkomendasikan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi fasilitasi pelatihan lintas unit, penguatan tim khusus pengelola perubahan, serta pengembangan saluran komunikasi dua arah yang inklusif. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan yang masih terfokus pada Kementerian Agama sehingga generalisasi ke institusi lain perlu dilakukan secara hati-hati, serta belum mengukur dampak jangka panjang (lebih dari 3 tahun) terhadap indikator kinerja organisasi secara kuantitatif. Untuk itu, riset masa depan disarankan untuk melakukan studi longitudinal di berbagai kementerian/lembaga, mengintegrasikan pengukuran kuantitatif Net Benefits berdasarkan DeLone & McLean IS Success Model, serta menguji model adopsi yang telah diperluas ini pada konteks sistem informasi wajib lainnya seperti e-office, SPAN, atau SAKTI guna memperkuat generalisasi teori adopsi teknologi di birokrasi Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kementerian Agama berhasil menjadi strategi utama modernisasi dan penyederhanaan birokrasi karsipan melalui platform terintegrasi yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan arsip. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran krusial strategi komunikasi internal yang multikanal dan pelatihan pegawai yang berkelanjutan sebagai pendorong utama adopsi teknologi, sementara tantangan terbesar justru terletak pada kurangnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Temuan ini menegaskan bahwa dalam lingkungan mandatory use di



sektor publik Indonesia, kepatuhan regulasi menjadi pintu masuk awal, tetapi transformasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui pendekatan human-centered yang menggabungkan tekanan koersif dengan komunikasi intensif dan pemberdayaan pegawai.

Hasil penelitian ini dapat langsung diterapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan sistem informasi wajib, terutama dengan mengalokasikan sumber daya khusus untuk komunikasi internal dua arah, pelatihan lintas unit, dan pembentukan tim khusus pengelola perubahan. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan model adopsi yang telah diperluas ini ke dalam sistem e-office, SPAN, SAKTI, atau aplikasi SPBE lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi longitudinal lintas kementerian/lembaga dengan pendekatan mixed-methods guna mengukur dampak jangka panjang SRIKANDI terhadap kinerja organisasi, serta menguji validitas model adopsi yang menggabungkan UTAUT-2 dan coercive isomorphism pada konteks birokrasi Indonesia yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdou, A. M. (2021). Good governance and COVID-19: The digital bureaucracy to response the pandemic (Singapore as a model). *Journal of Public Affairs*, 21(4), e2656.
- Adiguna, A. F., & Nasrullah, M. (2021). *Utilization of Information and Communication Technology at the Baranti District Office, Sidenreng Rappang Regency*. 8(1), 157–164.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Fitri, M. (2020). *Transformasi Arsip Dalam Menghadapi Era Digital*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.



Hasibuan, I. A., Dakwah, M. M., Agama, K., & Birokrasi, R. (2024). *Membangun Organisasi Formal: Tahapan Strategis Kemenag Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik*. 1(2), 128–153.

Hendrowati, R., Trisari, W., Putri, H., Dikara Barcah, Q. K., Ganesha, M. T., Syahlevi, R., Kom Direktorat, S., Pengetahuan, M., & Masyarakat, P. (2020). *Inovasi “Myparmad” sebagai Pendukung Kualitas Kegiatan Akademik di Universitas Paramadina*.

Jamaluddin, J., Adiguna, A. F., Suprianto, S., Nasrullah, M., Saleh, S., & Syaekhu, A. (2021). Utilization of Information and Communication Technology at the Baranti District Office, Sidenreng Regency, Rappang. *Jurnal Ad'ministrare*, 8(1), 157. <https://doi.org/10.26858/ja.v8i1.20136>

Lee, A. V., Maselkossu, D. R., Kahono, C. B., Yulianto, D. P., Devi, M. M. S., Murianigtias, R., Danu, Y. R., & Jebarut, K. (2025). *Fondasi Sistem Informasi Keuangan Modern*. SIEGA Publisher.

Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital-era governance. *Canadian Public Administration*, 60(4), 627–656.

Maryatun, I. (n.d.). Menyelami Ingatan Kolektif: Peran dan Tantangan Arsip Audiovisual di Era Digital. *REDAKSI DAFTAR ISI*.

Mustikawati, I., Kasmad, R., & Wulandari, F. R. (2024). Pelayanan Publik Kepada Madrasah Aliyah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 11287–11300.

Nurhafni, Ar Rahman, D., Mardhiah, A., Fazril, M., Bin Abu Bakar, M., & Fakhrurrazi, F. (2025). The Effectiveness of Implementing the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) at the Ministry of Religion Office of Lhokseumawe City. *KnE Social Sciences*, 10(4), 427–437. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18051>

Qolby, A. N., & Taufik, Y. (2025). Analisis Implementasi Arsip Digital Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 59–70.

Rahman, D. A., & Fazril, M. (2025). *The Effectiveness of Implementing the Integrated Dynamic Archival Information System ( SRIKANDI ) at the Ministry of Religion Office of Lhokseumawe City*. 427–437. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18051>

Sudarmanti, R., & Yusuf, K. (2025). *PENELUSURAN LITERATUR PEMANFAATAN AKTIVITAS DIGITAL PUBLIC RELATIONS PENGEMBANGAN WISATA*



*BAHARI ISLAMI. Aiccon, 43–52.*

- Suprayitno, S., Rahmi, R., & Sofiyani, Z. (2024). Imagining the Future of Records Management: An Analysis of the SRIKANDI in Indonesia through Documentation Studies. *Proceedings from the Document Academy*, 11(2). <https://doi.org/10.35492/docam/11/2/8>
- Teku, M., Gobang, J., Retu, M., & Sedu, V. (2024). Digital Transformation of Archives through the SRIKANDI Application. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(2), 261–268. <https://doi.org/10.56371/ijess.v5i2.334>
- Teku, M. V., Gobang, J. K. G. D., Retu, M. K., & Sedu, A. (2024). *Digital Transformation of Archives through the SRIKANDI Application*. 6(2), 261–268.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273–315.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 157–178.
- Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).